

STRATEGI KOREA SELATAN DALAM MEMPERTAHANKAN PULAU DOKDO DARI KONFLIK SENKETA DENGAN JEPANG (1996 – 2018)

South Korea Strategy In Maintaining Dokdo Island From A Dispute Conflict With Japan (1996 - 2018)

Layli Maghfirah

Abstract

This study tries to explain and analyze the methods carried out by the South Korean state in defending Dokdo Island. Dokdo Island itself is a coral island consisting of 2 rocks namely Seodo and Dongdo. This island is believed by South Korea to have historically been its ownership. Dokdo Island has an important meaning for South Korea where when viewed geographically close to the territory of South Korea. There are potential natural resources that can benefit the people of South Korea. The national identity of Dokdo Island is a pride that cannot be surrendered to Japan, which had colonized South Korea. Mutual claims continue to occur until South Korea makes use of or effective occupation such as, conducting research, tourism development and security of Dokdo Island in proving and maintaining the island.

Keywords: South Korea, Dokdo island, Japan, Claims.

Pendahuluan

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan dan udara di atasnya. Wilayah sebagai kesatuan geografis merupakan tempat bagi penduduk dan pemerintah suatu negara melakukan berbagai aktivitasnya.

Suatu wilayah merupakan keberadaan penting bagi suatu negara. Untuk itu wilayah paling sering diperdebatkan dan diperebutkan. Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara, atau dapat juga dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan. Hingga saat ini klaim dan

konflik sengketa menjadi permasalahan disuatu negara. Sengketa konflik yang masih berjalan hingga kini salah satunya terjadi di kawasan Asia Timur.

Korea Selatan merupakan negara yang berada di kawasan Asia Timur. Luas wilayah Korea Selatan mencapai 100.460 Km (Kementrian Luar Negeri Indonesia). Korea Selatan berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti sebelah utara berbatasan dengan Korea Utara, tenggara dengan Jepang, selatan dengan Laut Kuning, barat daya dengan China, dan barat dengan China. Wilayahnya terdiri dari 3000 Pulau yang rata-rata merupakan pulau kecil yang tidak memiliki penghuni. Banyak pulau-pulau di Korea

Selatan sendiri berbatasan dan berdekatan dengan negara lain yang berada dalam satu kawasan Asia Timur. Karena itu Korea Selatan tidak bisa mengindari adanya konflik yang terjadi karena batasan dengan negara lainnya,

Pulau Dokdo salah satunya sebagai pulau yang diklaim oleh Korea Selatan dan Jepang. Pulau Dokdo merupakan gugusan pulau yang memiliki luas sekitar 187,450m² terdiri dari dua pulau kecil disekitarnya (maemi). Luas Seodo 88.674 m² dan luas Dongdo adalah 73.297 m². Pulau Dokdo ini merupakan pulau yang diperebutkan oleh Korea Selatan dan Jepang. Pulau Dokdo adalah pulau sebutan untuk Korea Selatan yang memiliki arti yang artinya pulau karang (Syafitri, 2013).

Sedangkan pulau yang sama disebut dengan pulau Takeshima oleh Jepang. Pulau Dokdo berada di sebelah timur dari arah Pulau Ulleungdo Korea Selatan berjarak sekitar 134 mil laut Korea Selatan dan sebelah tenggara Pulau Oki Jepang berjarak 100 mil laut. Hal itu pula yang menjadi penyebab perebutan wilayah yang belum jelas.

Hubungan Korea Selatan dengan Jepang memang sudah kurang baik. Dimulai dari masalah klaim wilayah hingga penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan. Mereka terus melakukan klaim satu sama lain dalam kepemilikan Pulau Dokdo. Korea Selatan mengklaim secara sejarah, Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo berada di bawah kedaulatannya

berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Dokdo pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemilik yang dinamakan Ussankuk dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.10 (Cahayani, 2018), sedangkan Jepang mengklaim secara geografis dan berdasarkan pasal 2 perjanjian Fransisco.

Korea Selatan sendiri berupaya melindungi Pulau Dokdo dengan mengumpulkan bukti sejarah dan melakukan berbagai aktivitas untuk membuktikan pulau dokdo sebagai kepemilikannya. Karena konsekuensi dari pengajuan pulau dokdo ke mahkamah internasional memiliki hasil yang bersifat mutlak. Tentu dampak terbesar Korea Selatan akan mendapatkan ataupun kehilangan Pulau tersebut. Selain banyaknya potensi yang ada di Pulau tersebut, Pulau dokdo merupakan harga diri Korea Selatan yang menjadi simbolis kemerdekaan Korea Selatan oleh Jepang. Jadi jika jatuh ketangan Jepang itu dapat menghancurkan kebebasan dan kebanggaan Korea Selatan dari Jepang.

Hingga Proses saling klaim itu terjadi dikarenakan belum jelasnya batas wilayah kedua negara mengenai Pulau tersebut. Klaim ini kadang juga membuat masyarakat melakukan protes. Seperti yang pernah dilakukan masyarakat Korea Selatan ke kekantor

kedutaan Jepang di Korea Selatan. Hal itu disebabkan klaim yang dilakukan. Penyelesaian melalui upaya diplomatik juga tidak menemukan titik terang. Korea Selatan lebih fokus mengumpulkan dokumentasi bukti-bukti kepemilikan Pulau Dokdo. Korea Selatan hanya melakukan pertemuan diplomatik dan negosiasi dengan Jepang mengenai Pulau Dokdo.

Dalam penelitian studi kasus ini (Strategi Korea Selatan dalam mempertahankan Pulau Dokdo tahun 1996-2018) untuk mengetahui strategi dalam menghadapi permasalahan teritorial dispute atau persengketaan wilayah yang dimana cara mengetahui permasalahan ini dirasa relevan jika menggunakan teori atau prinsip *effective occupation* (pendudukan efektif).

1. Teori Effective Occupation

Menurut hukum internasional cara penambahan wilayah yang dibenarkan adalah dengan cara damai tanpa kekerasan. Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah dengan kekerasan. Berikut bunyi pasal tersebut : "In carrying out international relations, all members must prevent actions in the form of threats or violence against the sovereignty or political independence of other countries"

Mengenai prinsip – prinsip perolehan kedaulatan atas wilayah negara, terkhusus mengenai prinsip ‘pendudukan efektif’ atau *effective occupation*. Dalam Prinsip perolehan

wilayah dalam hukum internasional didasarkan atas salah satu dari 2 hal yang ada;

- a. Argumen atas dasar Perjanjian Internasional yang telah ada sebelumnya (*treaty-based argument*). Dimana pihak yang bersengketa menggunakan dasar perjanjian menyangkut wilayah sengketa tersebut.
- b. Argumen atas dasar praktek-praktek yang dilakukan negara bersengketa atas wilayah yang disengketakan dengan bukti penguasaan secara efektif. Dengan mengajukan pernyataan kehendak untuk menguasai dan memelihara wilayah tersebut secara formal maupun non formal. Cara lainnya melakukan *effective actions* oleh negara tersebut seperti tindakan pemerintah secara eksekutif, administratif, pembentukan hukum dan lainnya (Yusuf, 2003)

Cara memperoleh yang dibenarkan menurut hukum internasional, yaitu okupasi.

Okupasi merupakan penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun, yang dapat berbentuk *terra nullius* yang baru ditemukan. Penguasaan harus dilakukan oleh negara secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikannya sebagai bagian dari negara kedaulatan. Dengan tindakan secara simbolis seperti melalui

pemancangan bendera atau melalui proklamasi.

Agar penemuan tersebut memiliki arti yuridis harus dilengkapi dengan penguasaan secara efektif untuk suatu jangka waktu tertentu.

Dalam menentukan apakah prinsip okupasi sudah dilaksanakan secara hukum internasional adalah mensyaratkan dua unsur prinsip keeffektifan :

Adanya suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai pihak yang berdaulat dan Melaksanakan dan menunjukkan kedaulatan secara pantas. Suatu tindakan yang jelas atau simbolis dengan langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku di wilayah yang diklaim. Mengajukan klaim melalui perjanjian negara, atau dengan menentukan penetapan batasan wilayah.

Dari kerangka pemikiran diatas ditemukan bahwa Korea Selatan memiliki beberapa tujuan dan strategi yang dilakukan dalam mempertahankan Pulau Dokdo adalah memaksimal pemanfaatan dan menunjukkan keinginan untuk memiliki Pulau tersebut atau melalui cara okupasi hal itu meliputi :

1. Melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo Setiap tahunnya. Dalam rangka melakukan penelitian terhadap potensi Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk Korea Selatan.
2. Melakukan Pengembangan Pariwisata di Pulau Dokdo dalam hal meningkatkan potensi perekonomian.

3. Melakukan Penjagaan terhadap keamanan Pulau Dokdo, sebagai penentu batasan perairan Korea Selatan dan Jepang, dengan membangun Mercusuar dan melakukan patroli keamanan disekitar Pulau guna menjaga keutuhan wilayah

Dan penulisan ini menggunakan metode library research.

Pembahasan

A. Eskalasi Sengketa Pulau Dokdo

Pulau Dokdo merupakan sebutan Pulau tersebut untuk Korea Selatan yang memiliki arti Pulau Karang. Sedangkan Jepang menyebut Pulau tersebut Pulau Takeshima atau diartikan pulau bambu. Dokdo adalah pulau yang terletak kira-kira di pertengahan antara Semenanjung Korea dan kepulauan Jepang pada $37^{\circ} 14' 26,8''$ N dan $131^{\circ} 52' 10,4''$ E.

Dokdo merupakan gugusan 2 pulau yang juga biasa dinamakan Seodo dan Dongdo. Serta secara harfiah bisa disebut Pulau Barat dan Pulau timur. Keseluruhan luas dari Pulau Dokdo adalah 187.453 m^2 , yang masing memiliki luas Seodo 88.674 m^2 dan luas Dongdo adalah 73.297 m^2 . Pulau Dokdo ini secara geografis berada di sebelah timur Pulau Ulengdo Korea Selatan dan sebelah tenggara Pulau Oki yang dimiliki Jepang. Jika dilihat dari jarak memiliki jarak 134 mil laut dari korea selatan dan 138 mil laut dari wilayah Jepang (Syafitri, 2013) . Dokdo

terbentuk oleh letusan gunung berapi di laut Timur

Karena kebutuhan Perang Korea Selatan memberikan Pulau yang tidak dimiliki tersebut kepada Jepang. Pada saat itu tahun 1905 Jepang menganeksasi Pulau tersebut sekaligus wilayah semenanjung Korea. Jepang pada akhirnya menjajah wilayah Korea Selatan. (Hafizi, 2018).

Penjajahan diawali ketika Jepang menang dalam perang Jepang - Rusia. Jepang berperang atas kepentingannya di Manchuria dan peninsula Korea. Jepang memaksa kekaisaran Korea untuk menandatangani Protokol Korea – Jepang pada bulan Februari 1904 agar memiliki akses yang mudah dalam melawan Rusia. Jepang berusaha mengubah Dokdo ke dalam wilayahnya, dimana memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan militernya dalam menghadapi kemungkinan bentrokan waktu dengan Rusia (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014).

Hingga pada akhir Perang Dunia II Jepang mengalami kekalahan. Hal itu yang menjadi titik terang pengakuan kemerdekaan Korea Selatan dari jajahan Jepang. Pada saat itu Jepang mundur saat dikalahkan oleh sekutu tepatnya tahun 1945. Hal itu membuat Jepang harus mengakui kealahannya dengan mundur dari negara yang dijajah. Serta mengakui semua kemerdekaan negara yang ia kolonialisasi. Termasuk mengakui kemerdekaan Korea Selatan. Kekalahan Jepang membuat ia juga

harus membayar kerugian perang dan membuat suatu perjanjian damai. Pada saat itu sekutu yang memiliki peran utama adalah Amerika Serikat. Perjanjian itu disebut dengan Perjanjian Fransisco sebagai pengesahan pengakuan Jepang mengakui kebebasan berbagai negara termasuk Korea Selatan.

Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo berada di bawah kedaulatannya berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Dokdo pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemilik yang dinamakan Ussankuk dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.10 (Hafizi, 2018). Merupakan dasar klaim yang diketahui secara umum.

Dasar klaim yang lainnya Dokdo telah diakui secara geografi sebagai bagian dari Ulleungdo. Pada hari yang cerah, Dokdo terlihat secara kasat mata dari Ulleungdo Korea (Pulau Ulleung), pulau yang terletak di dekat (87,4 km) ke Dokdo. Berdasarkan letak geografisnya, Dokdo secara historis telah menjadi bagian dari Ulleungdo (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014). Hal ini terlihat jelas dari dokumen awal Korea pada pemerintahan masa Joseon, Sejong Silik Jiriji (Seksi Geografi Pemerintahan Raja Sejong) Pulau Dokdo dan Ulleugndo tidak jauh berbeda. Pulau Dokdo merupakan salah satu Pulau yang bisa

terlihat dengan jelas dari Ulleungdo bisa dikatakan pulau yang paling berdekatan.

Jika dilihat Jepang juga memiliki dasar klaimnya sendiri. Pada saat dahulu berhasil menganeksasi Korea Selatan. Pulau Dokdo yang dianggap Jepang sebagai wilayah yang tidak ada pemilikinya, kemudian mulai direbut oleh Jepang. Hingga pada tanggal 22 Februari 1905, Jepang resmi memasukkan Pulau Dokdo sebagai bagian dari wilayah Jepang dan berada dalam Prefektur Shimane (Hafizi, 2018). Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan militernya dalam menghadapi kemungkinan bentrokan Maritim dengan Rusia di laut Timur. Seperti yang ditunjukkan, pemberitahuan umum Prefektur Shimane No. 40 adalah bagian dari rencana sistematis Jepang untuk melemahkan kedaulatan Korea.

Upaya Jepang untuk menggabungkan Dokdo adalah tindakan ilegal yang dilanggar atas pulau yang tidak dapat disangkal oleh Korea, yang telah didirikan selama jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, pemberitahuan umum Prefektur Shimane No. 40 tidak berlaku dan Batal berdasarkan hukum internasional (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014).

Klaim lain Jepang adalah dari adanya Perjanjian Fransisco yang dikeluarkan setelah PD II. Perjanjian tersebut dibuat pasca kekalahan Jepang atau disebut perjanjian damai. Perjanjian ini ditanda tangani 8 September 1951 dan berlaku pada 28

April 1952 (United Nation Treaty Series 1952). Melalui perjanjian ini Jepang mengharapkan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara yang pernah berkonflik dengannya. Serta memiliki niat bergabung dikeanggotaan PBB untuk mewujudkan Perdamaian. Hal itu yang mendasari Jepang dalam perjanjian damai ini.

Pulau Dokdo memiliki arti penting bagi Korea Selatan. Pentingnya bukan hanya sekedar memperjuangkan wilayah tetapi juga identitas nasional. Korea Selatan menolak tiga anggota Parlemen yang berusaha mengunjungi Kepulauan Dokdo karena sengketa tersebut (Dong & Chubb, 2011). Potensi emosional dari isu 'Dokdo' di Korea Selatan mengungkapkan betapa kuat memori sejarah.

Masalah ini menyatukan semua orang Korea, tidak peduli apa kecenderungan politik mereka – kejadian langka di suatu negara yang sendiri sangat ideologis dan secara politis terbagi. Pulau Dokdo merupakan bagian dari salah satu memori sejarah yang kelim bersama Jepang. Apabila masalah klaim itu dianggap mudah, menjadi sebuah hal yang harus dipertahankan

Arti penting pulau dokdo lainnya adalah apa yang dimiliki pulau tersebut dan bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan pemerintah maupun masyarakat dalam keberlangsungan negara Korea Selatan. Pulau Dokdo memiliki potensi sumber daya alam yang kaya. Berikut lingkungan alam disekitar Pulau Dokdo

seperti mengetahui keadaan arus samudera dingin disekitar Dokdo dengan adanya Bukhan Current, sejenis arus dingin, mengelilingi Dokdo, sementara Tsushima Saat ini, hangat saat ini, naik ke utara Dokdo. Persimpangan arus dingin dan hangat bersama dengan plankton yang melimpah menyediakan kondisi ideal untuk tempat memancing.

Dokdo memiliki iklim lautan dengan angin laut yang kuat. Angin topan dan badai laut terjadi sekitar 180 hari setahun dan hari yang cerah terjadi sekitar 47 hari setahun. Memiliki tempat memancing yang baik Laut di sekitar Dokdo, di mana arus Bukhan mengalir dari Utara dan Tsushima hangat saat berpotongan satu sama lain, memiliki banyak plankton, dan bentuk yang baik tempat memancing di mana cumi, Alaska Pollak, COD, gurita kecil, salmon, ikan trout, hiu, stingray, dan udang yang berlimpah (English.busan.go.kr). Berbagai organisme atau hewan yang tinggal di sekitar Pulau Dokdo itu menjadikannya istimewa.

Dalam penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo ini sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan. Salah satunya yang sangat terlihat adalah membawa permasalahan ini ke mahkamah Internasional (*International Court Justice*). Terutama negara Jepang sudah sering kali memasukan proposal untuk di bahasa dan diselesaikan di ICJ. Terhitung sudah 3 kali hal itu dilakukan, dari tahun 1954, 1962, dan 2012 (Paramitha, 2013). Hal itu

ditanggapi berbeda oleh Korea Selatan sebagai berikut di tahun 1954.

Sampai saat ini, Korea Selatan menentang usulan ICJ pada tiga bidang. Pertama, kolonisasi memainkan peran kecil dalam hukum ICJ, dan Korea Selatan meyakini bahwa isu Dokdo adalah masalah keadilan pasca-kolonial. Kedua, peristiwa konferensi perdamaian Den Haag pada 1907, di mana Kekaisaran Jepang diberikan perwalian atas Korea oleh kekuatan Barat, masih diingat secara luas di Korea (Flamm, 2014). Oleh karena itu, peninggalan dari ketidakpercayaan di lembaga internasional tetap ada saat ini, dikombinasikan dengan persepsi bahwa Jepang masih memiliki pengaruh yang lebih besar dalam ranah internasional.

Penyelesaian lainnya yang pernah dilakukan selain membawa ke ICJ adalah dengan cara negosiasi. Negosiasi awal dimulai pada bulan April tahun 2006. Negosiasi ini bertepatan dengan usaha Jepang melakukan pengumuman tentang rencana ingin melakukan riset ilmiah di wilayah Pulau Dokdo yang dimana wilayah perairan tersebut diakui dari Korea Selatan sebagai batas Zona Ekonomi Eksklusifnya (Hafizi, 2018). Pengumuman penelitian dan riset yang diumumkan oleh Jepang menyebabkan ketegangan bagi hubungan Korea Selatan – Jepang. Hal tersebut yang memicu kedua negara melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut

B. Penelitian Potensi Sumber Daya Alam

Pulau Dokdo memiliki arti penting bagi Korea Selatan. Wilayah laut disekitar Pulau Dokdo memiliki berbagai ekosistem yang berbeda dan bermanfaat bagi Korea Selatan sendiri. Salah satunya penemuan gas hidrat di wilayah timur laut yang memiliki manfaat bagi keberlangsungan suatu negara. Korea Selatan yang kekurangan minyak dan sumber daya gas. Oleh karena itu keinginan untuk memanfaatkan hal tersebut. Korea Selatan mulai melakukan penelitian mengenai berbagai sumber daya dan potensi Pulau Dokdo di tahun 2000'an pasca negosiasi mulai sering dilakukan dengan Jepang.

Gas hidrat dianggap sebagai penemuan yang sangat berharga di Pulau Dokdo. Untuk itu terus dilakukan Penelitian tiap tahunnya. Gas hidrat dapat digunakan sebagai sumber daya yang mengganti minyak yang semakin lama semakin berkurang. Tentu saja minyak bumi tidak dimiliki di wilayah Korea Selatan. Tidak hanya gas hidrat juga ditemukan potensi sumber daya mineral (Syafitri, 2013).

Gas hidrat adalah kristal padat yang tersusun dari gas metana dan molekul air. Umumnya gas hidrat ditemukan jauh di dasar laut, dan memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dari gas alam konvensional. Sampai saat ini, ekstraksi dari gas hidrat tersebut belum dilakukan. Dibutuhkan biaya yang besar dan teknologi yang memadai untuk dapat mengambil gas hidrat tersebut dari dalam tanah di dasar laut. Akan tetapi, perkembangan teknologi yang sudah semakin maju

telah memungkinkan untuk melakukan pengeboran dasar laut untuk mengambil gas hidrat tersebut (Syafitri, 2013).

Korea Selatan memiliki organisasi dan program tersendiri yang dilakukan dalam mengolah gas hidrat yang banyak ditemukan di sekitar laut Pulau Dokdo. Bersama dengan KIGAM (*Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources*) dan *Gas Hydrate R&D Organization* mengolah potensi gas hidrat tersebut. KIGAM melakukan sosialisasi dan penjelasan mengenai potensi gas hidrat dengan beragam cara, salah satunya pembuatan konten yang menjelaskan pentingnya gas hidrat dan program-program yang akan dilakukan.

Setelah sering dilakukan penelitian mengenai potensi alam ditemukan Vegetasi bawah laut Dokdo agak mirip dengan Laut Selatan, Pulau Jeju, daerah tropis di Belahan Utara dan bahkan Mediterania, tetapi sangat unik karena dapat diklasifikasikan sebagai ekosistem yang terpisah.

Perbendaharaan sumber daya ikan Pulau Dokdo di mana banyak jenis ikan termasuk cumi-cumi dan pollack Alaska hidup secara berkelimpahan. Ini memiliki nilai besar dalam fungsinya sebagai tempat musim dingin dan tempat istirahat; sebagai resor wisata; dan basis pengembangan untuk sumber daya bawah tanah di bawah dasar laut. Sebenarnya, jumlah tangkapan di sekitar daerah penangkapan ikan Dokdo memengaruhi pasokan dan permintaan Korea (Tai, 2001). Nelayan Korea Selatan dan Jepang sudah mengakui

bahwasangan sumber perikanan di daerah tersebut sangatlah menjanjikan .

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan mengenai potensi perikanan pemerintah Korea dan masyarakat terus melakukan aktivitas yang dapat menguntungkan di tempat tersebut. Saat ini, sepertiga dari total populasi, 3.249 orang dari populasi 11.102, berada di industri perikanan. Sebagian besar dari para penasehat, pekerjaan di industri perikanan. Fungsi utamanya adalah sebagai Ekosistem Laut di Kepulauan Dokdo dan Ulleungdo basis perikanan (Tai, 2001).

C. Pengembangan Pariwisata

Kementrian pariwisata Korea Selatan menunjukan bahwa pariwisata menuju Pulau Dokdo terus meningkat. Pada tahun 2003 ada 1.503 orang dan pada tahun 2004 telah naik menjadi 1.597 orang wisatawan, yang datang ke pulau tersebut dengan menggunakan kapal dari Pulau Ullengdo. Bahkan pada tahun 2012, total wisatawan yang mengunjungi wilayah laut sekitar Pulau Dokdo melonjak hingga mencapai 200.000 orang (Syafitri, 2013).

Pulau Dokdo sebagai pulau tujuan pariwisata sangatlah menjanjikan. Karena berbagai ekosistem unik dan pemandangan yang dimiliki membuat banyak wisatawan yang tertarik. Korea Selatan tetap menamai Pulau Dokdo sebagai tujuan wisata yang dimiliki oleh negaranya. Hingga sekarang banyak promosi yang dilakukan pemerintah untuk membuat wisatawan berkunjung.

Berikut berbagai fasilitas dan ekowisata yang ada di Pulau Dokdo yang menunjukan sebagai Pulau tujuan wisata. 36 pulau karang dan terumbu karang, dan beragam burung laut dan biota laut menambah Keindahan Dokdo. Dokdo adalah tempat berkembang biaknya camar berekor hitam dan Petrel berekor garpu Swinhoe dan ditetapkan sebagai Monumen Alam No. 336. Sehingga oleh pemerintah sedemikian rupa dilindungi dan dijaga habitat burung – burung tersebut, sebagai species yang dimiliki oleh ekosistem Pulau Dokdo.

Bentuk batuan yang unik juga menjadi perbedaan Pulau Dokdo dengan yang lainnya. Walaupun didaerah tersebut susah untuk ditumbuhi pohon. Tetapi juga tumbuh berbagai tanaman yang indah disana. Hal lainnya seperti pemandangan matahari terbit dan terbenam juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata Pulau Dokdo (English.busan.go.kr).

Jumlah pengunjung ke Dokdo (Pulau Timur) sejak 2005 telah mencapai 2.000.000. 500 wisatawan berkunjung ke Dongdo setiap harinya (pada Maret 2019). Izin sebelumnya dari Ulleung-Gun diperlukan untuk mengunjungi Seodo (Ministry of Foreign Affairs). Setiap tahunnya wisatawan terus meningkat, wisatawan bisa terdiri dari yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Jumlah wisatawan setiap tahunnya

Tahun	Jumlah
2005	41,134
2006	78,152
2007	101,428
2008	129,910
2009	135,376
2010	115,074
2011	179,621
2012	205,778
2013	255,838
2014	139,892
2015	178,785
2016	206,630
2017	206,111
2018	226,645
2019 .03	10,094
Total	2,210,468

Sumber : <http://dokdo.mofa.go.kr/-eng/introduce/residence.jsp>

D. Penjagaan Keamanan dan Pelatihan Militer

Pembahasan keamanan Pulau Dokdo, maka Korea Selatan adalah yang paling ketat melakukan hal tersebut. Korea Selatan sudah fokus melakukan

aktivitas disekitar Pulau untuk menjaga keamanan Pulau Dokdo mulai dari tahun 1952. Hal itu ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia II, dimana kekalahan Jepang membuatnya harus mengakui kemerdekaan negara jajahannya termasuk Korea Selatan dan berbagai pulau yang Jepang kuasai, karena merujuk kepada Perjanjian damai Fransisco yang disepakati oleh Jepang.

Pada tanggal 18 Januari 1952, pemerintah Korea mengumumkan Proklamasi Kedaulatan atas Lautan Berdampingan (Pemberitahuan No. 14 dari Dewan Kabinet mengenai Garis Perdamaian). Garis MacArthur, sebuah garis batas perbatasan laut Korea di bawah Capton 1033, membatasi penangkapan ikan Jepang Kegiatan di sekitar Semenanjung Korea setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, tetapi peningkatan jumlah kapal penangkap ikan Jepang melanggar perairan teritorial Korea dekat Dokdo setelah pecahnya Perang Korea pada tahun 1950

Dengan demikian, Jalur Perdamaian dinyatakan dengan tujuan melindungi maritim Korea Sumber daya di dekat Dokdo dan kedaulatan perdagangan melampaui perairan teritorial dan landas kontinen. Setelah deklarasi PeaceLine, pemerintah Korea mengambil tindakan hukum terhadap kapal-kapal Jepang yang melanggar garis dan menegaskan bahwa semua wilayah dalam garis tersebut, termasuk Dokdo, berada di bawah yurisdiksi.

Presiden Korea Selatan melakukan deklarasi yang menciptakan garis imajiner bernama Rhee Line untuk membatasi wilayah Jepang dan Korea Selatan di Laut timur. Garis tersebut sebagian besarnya menunjukkan bahwa lautan Jepang terutama di bagian Pulau Dokdo merupakan bagian dari Korea Selatan. Hingga tahun 1954 disepakati untuk membangun mercusuar di Pulau Dokdo sebagai pusat untuk pemantau dan penjagaan militer Korea Selatan di Pulau Dokdo. Hingga saat ini menetapkan petugas penjagaan dan melakukan patroli disekitar Pulau. Korea Selatan menganggap pada saat itu bahwa Korea Selatan menunjukan penguasaan fisik terhadap Pulau Dokdo (Syafitri, 2013).

Semenjak dari saat itu hingga sekarang penjagaan terhadap Pulau Dokdo selalu dilakukan. Karena Jepang masih sering melakukan tindakan yang mengganggu wilayah dari Pulau Dokdo yang secara fisik dianggap kepemilikan Korea Selatan. Bahkan wisatawan yang mengunjungi Pulau Dokdo bisa melihat dan merasakan betapa dilindunginya Pulau tersebut dengan aturan dan penjagaan oleh militer/polisi Korea Selatan.

Pengakuan dari militer negara lain juga turut andil dalam pembuktian Pulau Dokdo sebagai wilayah Korea Selatan. Bagian lain dari bukti dokumenter menegaskan kedaulatan teritorial Korea Selatan atas Dokdo baru-baru ini terungkap, Angkatan Udara Amerika Serikat ternyata telah menunjukkan untuk masa lalu 57 tahun

bahwa Pulau berada di bawah kendali Korea Selatan. Menurut militer Korea Selatan, komando Asia Pasifik Angkatan Udara A.S. menetapkan Dokdo yang merupakan pulau di laut Timur yang diklaim oleh Jepang, di bawah zona identifikasi pertahanan udara Korea (Kadiz) dan telah mempertahankan status Sejak 1951 (Seok & Ilbo, 2008).

Pada tahun 2011, rencana untuk menjaga lebih lagi Korea Selatan selalu diperbincangkan. Korea Selatan mempertimbangkan penempatan pasukan militer di Dokdo. Perdana Menteri Korea Selatan mengatakan, ada baiknya untuk mempelajari gagasan penempatan pasukan militer di Dokdo untuk memperkuat kontrol kedaulatan atas pulau paling timur negara itu dalam menghadapi klaim teritorial Jepang yang berulang-ulang. Korea Selatan telah menjaga detasemen polisi kecil di Dokdo di Laut Timur sejak 1954 (News, 2011).

Pada kenyataannya, ini tepat untuk menempatkan polisi, tetapi tetap harus mempertimbangkan gagasan untuk mengerahkan pasukan militer yang kuat di sana, tergantung pada situasinya,' Perdana Menteri Kim Hwang-sik mengatakan kepada anggota parlemen. Kementerian Pertahanan mengatakan tidak memiliki komentar segera. Komentar Kim datang beberapa minggu setelah Tokyo menyetujui satu set buku teks sekolah menengah baru yang menggambarkan Dokdo sebagai wilayah Jepang. Langkah ini menghidupkan kembali kebencian

mendalam Korea Selatan terhadap Jepang, yang memerintah Semenanjung Korea antara 1910 dan 1945 sebagai koloni. Presiden Lee Myung-bak telah berjanji bahwa pemerintahnya akan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kontrol yang efektif atas Dokdo untuk melawan klaim baru Jepang terhadap pulau-pulau kecil itu. Korea Selatan awal pekan ini mengumumkan rencana untuk membangun basis ilmu kelautan yang telah lama dibayangkan di perairan Dokdo pada akhir tahun depan (News, 2011).

Hingga tahun 2012 militer Korea Selatan melanjutkan kembali pelatihan militernya sejak tahun 1996, di sekitar Pulau Dokdo. Karena Korea memang sering melakukan latihan dua tahunan di daerah laut timur Pulau Dokdo. Latihan kali ini tanpa memobilisasi Marinir dalam upaya nyata untuk meredakan ketegangan dengan Jepang. Korps Marinir telah melakukan latihan pendaratan di Dokdo di Laut Timur di bawah skenario bahwa angkatan bersenjata negara lain menyerbu pulau berbatu sebagai bagian dari latihan rutin yang dilakukan sejak 1996 (Hoon, 2012)

Korps marinir tiba – tiba diberhentikan dari pelatihan karena beberapa pertimbangan politik oleh pemerintah. Latihan kali ini dilakukan di bawah skenario baru bahwa warga sipil Jepang berusaha melakukan pendaratan ilegal di pulau-pulau terpencil. Coast Guard memimpin latihan bersama dengan militer

menyediakan peran pendukung. Beberapa pejabat pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan dalam pelatihan simulasi di Pulau Dokdo untuk tidak melibatkan marinir agar tidak memperburuk hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang. Jika Jepang merespons secara militer terhadap penyebaran Marinir, atau mengklaimnya sebagai bukti sengketa wilayah, Korea mungkin memiliki lebih banyak kerugian daripada keuntungan (Hoon, 2012)

Di antara rencana yang dijadwalkan adalah latihan pendaratan oleh Pembongkaran Bawah Air dan tim Laut, Udara, dan Darat Angkatan Laut, serta beberapa Marinir. Latihan ini juga melibatkan lima hingga enam kapal patroli laut dan kapal perusak, empat kapal patroli Penjaga Pantai, sebuah helikopter anti-kapal selam Lynx dan beberapa pesawat tempur dan patroli (Hee, National, 2015).

Militer telah melaksanakan program itu dua kali setahun sejak 1986, terakhir kali pada November, yang mengundang protes Jepang. Namun latihan terbaru diharapkan lebih intensif dari biasanya mengingat meningkatnya ketegangan teritorial antara kedua negara. Pemerintah Shinzo Abe sekali lagi menegaskan kembali kedaulatannya dalam sebuah makalah diplomatik tahunan, sementara mensertifikasi 18 buku pelajaran sekolah menengah yang diperbarui, yang sebagian besar membawa

penegasan yang diperkuat mengenai Dokdo (Hee, National, 2015)

Kesimpulan

Hingga sekarang konflik mengenai sengketa Pulau Dokdo ini belum memenuhi titik penyelesaian. Kedua negara masih terus saling mengklaim. Perbedaannya Korea Selatan lebih fokus terhadap pemanfaatan yang ingin ditunjukkan ke Jepang dan dunia internasional mengenai Pulau Dokdo sebagai kepemilikannya. Korea Selatan banyak melakukan hal – hal yang menghindari Jepang untuk mengambil klaim Pulau Dokdo. Karena strategi yang digunakan ternyata banyak memiliki manfaat dan keuntungan bagi Korea Selatan secara keamanan maupun perkeekonomian. Serta itu bisa menjadi bekal atau pedoman Korea Selatan mengklaim Pulau Dokdo untuk kedepannya

Sedangkan Jepang masih berusaha membawa hal tersebut ke jalur mahkamah internasional. Serta mengklaim dengan memprovokasi melalui tindakan langsung seperti perayaan peringatan Pulau Takeshima (Pulau Dokdo) sebagai kepemilikannya, atau dengan memasukan Pulau Dokdo sebagai wilayahnya di buku kurikulum pendidikan Jepang (Syafitri, 2013). Hingga Korea Selatan sendiri sampai melakukan demo ke kedutaan besar Jepang untuk Korea Selatan. Tapi hal itu oleh Jepang tetap dilakukan seiring keyakinan Jepang yang masih yakin terhadap Pulau Dokdo tersebut. Hingga kedua negara saling berlatih dan

menguatkan keamanan militer masing – masing apabila tindakan mereka sudah melewati batas dan dibutuhkannya perlawanan melalui perang.

Dalam penyelesaian sengketa wilayah melalui mahkamah Internasional banyak terdapat indikator yang digunakan sebagai penilaian salah satunya melalui perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Tetapi tidak hanya itu dalam kasus sipadan dan litigan Perebutan Pulau antara Indonesia – Malaysia ternyata Mahkamah Internasional juga menggunakan cara lain dalam penilaian yaitu pendudukan efektif (*Effective Occupation*).

Hal itu yang dilakukan Korea Selatan dalam mempertahankan Pulau Dokdo. Pemanfaatan secara efektif Pulau Dokdo seperti melakukan penelitian potensi Sumber daya Alama Pulau Dokdo yang ternyata memiliki kandungan gas hydrate sebagai cadanga energi Korea Selatan yang dapat dimanfaatkan. Selain itu terdapat berbagai ekosistem hewan dan juga populasi ikan yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk nelayan Korea Selatan.

Hal lain yang dilakukan dalam pemanfaatan Pulau Dokdo ini yaitu dijadikannya Pulau Dokdo sebagai objek wisata yang sangat digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Dilihta dari keindahan alam, ekosistem hewan yang bermacam – macam menjadi daua tarik Pulau Dokdo. Hingga Pulau Dokod terus diperbaiki dan difasilitasi hal – hal yang

berhubungan dengan pariwisata. Pada tahun 2005 Pulau Dokdo dijadikan terbuka untuk wisata umum dan terus meningkat persentase kunjungan wisatawanannya.

Terakhir yaitu penjagaan keamanan di Pulau Dokdo memang sudah terbentuk dari deklarsi Presiden mengenai garis rhee lie perbatasan Korea Selatan dan Jepang serta danya pembangunan mercusuar. Sejak saat itu Pulau Dokdo dijaga sangat ketat oleh militer Korea Selatan Pulau Dokdo dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan militer Korea Selatan agar terhindar dari klaim Jepang atau apabila sewaktu – waktu Jepang akan merebut Pulau Dokdo kembali dari pemafaatan yang dilakukan Korea Selatan. Pemanfaat atau pendudukan efektif ini sekaligus membuktikan keseriusan Korea Selatan menjadikan Pulau Dokdo sebagai kepemilikannya dengan dimanfaatkan dengan berbagai cara tersebut.

Daftar Pustaka

- Cahyani, R. (2018, Desember). *SENGKETA MENGENAI PULAU DOKDO ANTARA JEPANG DENGAN KOREA*. Retrieved Oktober 9, 2019, from Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/329999321_SENGKETA_MENGENAI_PULAU_DOKDO_ANTARA_JEPANG_DENGAN_KOREA
- Dong, P. J., & Chubb, D. (2011, Agustus 17). *Why Dokdo Matters to Korea*. Dipetik November 19, 2019, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2011/08/why-dokdo-matters-to-korea/>
- Flamm, P. (2014, Agustus 26). *Dokdo and South Korean National Identity*. Dipetik November 24, 2019, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2014/08/dokdo-and-south-korean-national-identity/>
- Hafizi, A. N. (2018, Desember). *Sengketa Mengenai Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea*. Dipetik November 13, 2019, dari Researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/329999321_SENGKETA_MENGENAI_PULAU_DOKDO_ANTARA_JEPANG_DENGAN_KOREA
- Hee, S. H. (2015, Mei 6). *National*. Dipetik Desember 13, 2019, dari The Korea Herald: http://khnews.kheraldm.com/view.php?ud=20150506001078&md=20150506185730_BL
- Hoon, L. T. (2012, September 3). *National*. Dipetik Desember 11, 2019, dari The Korea Times: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2012/09/116_118985.html
- Kementrian Luar Negeri Indonesia. (n.d.). *Profil Negara Korea Selatan*. Retrieved Maret 15, 2019, from <https://www.kemlu.go.id/seoul/lc/Pages/Korea-Selatan.aspx>
- maemi. (n.d.). *A Brief Introduction To Korea's Dokdo (Takeshima) Island*. Retrieved Maret 15, 2019, from

- Dokdo - Takeshima:
www.dokdotakeshima.com
- Ministry of Foreign Affairs. (t.thn.). *Fact About Dokdo*. Dipetik November 28, 2019, dari Ministry of Foreign Affairs Republic Of Korea:
<http://dokdo.mofa.go.kr/eng/introduce/residence.jsp>
- Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. (2014). *Dokdo: Korean's Beautiful Island*.
- News, Y. (2011, April 82). *National* . Dipetik Desember 4, 2019, dari Korea Herald2:
<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20110408000445>
- Paramitha, F. D. (2013). STRATEGI JEPANG DAN KOREA SELATAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TERITORIAL PULAU TAKESHIMA /. *Journal Universita Airlangga*, 3.
- Seok, K. M., & Ilbo, J. (2008, Agustus 4). *Dokdo is shown as Korean in U.S. military maps* . Dipetik Desember 3, 2019, dari Korea JoongAng Daily:
<http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2893198>
- Syafitri, U. G. (2013). Sengketa Pulau Dokdo . *Sumatra Journal of International Law*, 6.
- Tai, K. K. (2001). Marine Ecosystem On Dokdo and Ullungdo Island. *Korean J. Ecol.*, 24(4), 249.
- United Nation Treaty Series 1952. (t.thn.). *Treaty of Peace with Japan* . Dipetik November 19 , 2019, dari Taiwan Document Project :
<http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm>
- Yusuf, D. A. (2003). *Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam Perolehan Wilayah*.